



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN PARIWISATA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
3	Pajak Daerah		-	-		-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-		-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-		-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-		-
7	Pajak Air Permukaan		-	-		-
8	Pajak Rokok		-	-		-
9	Pajak Alat Berat		-	-		-
10	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-		-
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-		-
12	Retribusi Daerah		5.505.000.000,00	2.092.029.000,00	38,00	6.312.626.300,00
13	Retribusi Jasa Umum		12.000.000,00	15.725.000,00	131,04	-
14	Retribusi Jasa Usaha		5.493.000.000,00	2.076.304.000,00	37,80	6.312.626.300,00
15	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-		-
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-		-
17	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-		-
18	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-		-
19	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-		-
20	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	172.034.500,00		335.302.750,00
21	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
22	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
23	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-		-
24	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-		-
25	Jasa Giro		-	-		-
26	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-		-
27	Pendapatan Bunga		-	-		-
28	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-		-
29	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	172.034.500,00		335.302.750,00
30	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-		-
31	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-		-
32	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-		-
33	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-		-
34	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-		-
35	Pendapatan dari Pengembalian		-	-		-
36	Pendapatan BLUD		-	-		-
37	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-		-
38	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-		-
39	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-		-
40	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-		-
41	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-		-
42	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-		-
43	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-		-
44	Pungutan bagi Wisatawan Asing		-	-		-
45	Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah		-	-		-
46	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>5.505.000.000,00</b>	<b>2.264.063.500,00</b>	<b>41,13</b>	<b>6.647.929.050,00</b>
47						
48	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
49	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-		-
50	Dana Perimbangan		-	-		-
51	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-		-
52	Insentif Fiskal		-	-		-
53	Dana Bagi Hasil (DBH)		-	-		-
54	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	-		-
55	Dana Alokasi Khusus (DAK)		-	-		-
56	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-		-
57	Pendapatan Bagi Hasil		-	-		-
58	Bantuan Keuangan		-	-		-
59	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
60						
61	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
62	Pendapatan Hibah		-	-		-
63	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
64	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
65	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-		-
66	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-		-
67	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		-	-		-
68	Dana Darurat		-	-		-
69	Dana Darurat		-	-		-
70	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
71	Lain-lain Pendapatan		-	-		-
72	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-		-
73	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara		-	-		-
74	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat		-	-		-
75	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
76						
77	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>5.505.000.000,00</b>	<b>2.264.063.500,00</b>	<b>41,13</b>	<b>6.647.929.050,00</b>

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
78						
79	<b>BELANJA DAERAH</b>					
80	<b>BELANJA OPERASI</b>					
81	Belanja Pegawai		25.408.058.000,00	24.550.053.167,00	96,62	23.980.890.487,00
82	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		11.443.317.000,00	10.843.716.091,00	94,76	11.026.199.212,00
83	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		13.231.801.000,00	12.976.657.076,00	98,07	12.954.691.275,00
84	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		732.940.000,00	729.680.000,00	99,56	-
85	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-		-
86	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		-	-		-
87	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH		-	-		-
88	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP		-	-		-
89	Belanja Pegawai BOS		-	-		-
90	Belanja Pegawai BOSP		-	-		-
91	Belanja Pegawai BLUD		-	-		-
92	Belanja Barang dan Jasa		158.302.924.000,00	153.225.015.808,00	96,79	86.079.236.547,00
93	Belanja Barang		25.730.184.000,00	25.029.283.170,00	97,28	16.186.694.227,00
94	Belanja Jasa		107.552.592.000,00	104.573.513.603,00	97,23	34.393.304.059,00
95	Belanja Pemeliharaan		1.916.606.000,00	1.802.985.746,00	94,07	2.151.487.687,00
96	Belanja Perjalanan Dinas		16.531.742.000,00	15.310.683.289,00	92,61	16.719.055.574,00
97	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		6.571.800.000,00	6.508.550.000,00	99,04	16.628.695.000,00
98	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-		-
99	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-		-
100	Belanja Barang dan Jasa BOSP		-	-		-
101	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		-	-		-
102	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-		-
103	Belanja Bunga		-	-		-
104	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
105	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
106	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
107	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
108	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-		-
109	Belanja Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-		-
110	Belanja Subsidi		-	-		-
111	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-		-
112	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-		-
113	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-		-
114	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-		-
115	Belanja Hibah		139.359.975.000,00	138.633.255.000,00	99,48	110.325.000.000,00
116	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
117	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
118	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-		-
119	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-		-
120	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		139.359.975.000,00	138.633.255.000,00	99,48	110.325.000.000,00
121	Belanja Hibah Dana BOS		-	-		-
122	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-		-
123	Belanja Hibah Dana BOSP		-	-		-
124	Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
125	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-		-
126	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-		-
127	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-		-
128	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-		-
129	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>323.070.957.000,00</b>	<b>316.408.323.975,00</b>	<b>97,94</b>	<b>220.385.127.034,00</b>
130						
131	<b>BELANJA MODAL</b>					
132	Belanja Modal Tanah		-	-		-
133	Belanja Modal Tanah		-	-		-
134	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-		-
135	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.553.555.000,00	2.551.032.000,00	99,90	-
136	Belanja Modal Alat Besar		-	-		-
137	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-		-
138	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-		-
139	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-		-
140	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		2.000.000.000,00	1.999.582.000,00	99,98	-
141	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		-	-		-
142	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-		-
143	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-		-
144	Belanja Modal Alat Persenjataan		-	-		-
145	Belanja Modal Komputer		553.555.000,00	551.450.000,00	99,62	-
146	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-		-
147	Belanja Modal Alat Pengeboran		-	-		-
148	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-		-
149	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-		-
150	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-		-
151	Belanja Modal Alat Peraga		-	-		-
152	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-		-
153	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-		-
154	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-		-
155	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-		-
156	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP		-	-		-
157	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-		-
158	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		3.349.800.000,00	3.196.744.849,00	95,43	29.629.472.865,00
159	Belanja Modal Bangunan Gedung		3.349.800.000,00	3.196.744.849,00	95,43	29.629.472.865,00
160	Belanja Modal Monumen		-	-		-
161	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-		-
162	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-		-
163	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-		-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
164	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-		-
165	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-		-
166	Belanja Modal Bangunan Air		-	-		-
167	Belanja Modal Instalasi		-	-		-
168	Belanja Modal Jaringan		-	-		-
169	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-		-
170	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		-	-		-
171	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		-	-		-
172	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		-	-		-
173	Belanja Modal Hewan		-	-		-
174	Belanja Modal Biota Perairan		-	-		-
175	Belanja Modal Tanaman		-	-		-
176	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-		-
177	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-		-
178	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-		-
179	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-		-
180	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		-	-		-
181	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-		-
182	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-		-
183	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-		-
184	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-		-
185	<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>5.903.355.000,00</b>	<b>5.747.776.849,00</b>	<b>97,36</b>	<b>29.629.472.865,00</b>
186						
187	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>					
188	Belanja Tidak Terduga		-	-		-
189	Belanja Tidak Terduga		-	-		-
190	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
191						
192	<b>BELANJA TRANSFER</b>					
193	Belanja Bagi Hasil		-	-		-
194	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-		-
195	Belanja Bantuan Keuangan		-	-		-
196	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-		-
197	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-		-
198	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-		-
199	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-		-
200	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-		-
201	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota		-	-		-
202	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
203						
204	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>328.974.312.000,00</b>	<b>322.156.100.824,00</b>	<b>97,93</b>	<b>250.014.599.899,00</b>
205						
206	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(323.469.312.000,00)</b>	<b>(319.892.037.324,00)</b>	<b>98,89</b>	<b>(243.366.670.849,00)</b>
207						
208	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
209	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
210	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-		-
211	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-		-
212	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-		-
213	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-		-
214	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-		-
215	Penghematan Belanja		-	-		-
216	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		-	-		-
217	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
218	Sisa Belanja Lainnya		-	-		-
219	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-		-
220	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
221	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
222	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		-
223	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
224	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
225	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-		-
226	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
227	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
228	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
229	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
230	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
231	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
232	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
233	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
234	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-		-
235	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-		-
236	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-		-
237	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-		-
238	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
239	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
240	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-		-
241	Divestasi BLUD		-	-		-
242	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-		-
243	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah Dalam Kondisi Darurat		-	-		-
244	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
245						
246	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
247	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
248	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
249	Penyertaan Modal Daerah		-	-		-
250	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-		-
251	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-		-
252	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-		-
253	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-		-
254	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-		-
255	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-		-
256	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-		-
257	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-		-
258	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		-
259	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-		-
260	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
261	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-		-
262	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-		-
263	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-		-
264	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-		-
265	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-		-
266	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-		-
267	Pinjaman BLUD		-	-		-
268	Investasi BLUD		-	-		-
269	Pembentukan Dana Abadi Daerah		-	-		-
270	Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-		-
271	Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah		-	-		-
272	Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat		-	-		-
273	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>		-	-		-
274						
275	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		-	-		-
276						
277	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>		(323.469.312.000,00)	(319.892.037.324,00)	98,89	(243.366.670.849,00)

\* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KEPENDAHAAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



AGUNG HARIYADI, SE MM  
NIP. 197012021990031002